

Memori-Memori Kekerasan

Ketegangan,
Identitas, dan
Nasionalisme

EDITOR
GRACE LEKSANA
ARIF SUBEKTI
NANDA MEIJI

MARJIN KIRI

2025

Kekerasan Keheningan

TERBENTUKNYA JARAK ANTARA ORANG MALUKU
DI BELANDA DAN DI MALUKU, 1951-2021

Fridus Steijlen

PADA 2017, SEORANG SISWI SEKOLAH MENENGAH MENDatangi saya untuk membicarakan tentang makalah yang ditulisnya di sekolah. Ia keturunan Maluku dan berkerabat dengan salah seorang pemuda Maluku yang ikut serta dalam aksi penyanderaan di Belanda pada pertengahan 1970-an. Antara 1970 hingga 1978, sekelompok pemuda Maluku melakukan sebanyak enam aksi penyanderaan, tujuannya agar ideologi politik mereka tentang Republik Maluku Selatan merdeka diperhatikan (Steijlen 1996a). Ia menulis makalah tentang ideologi politik tersebut. Ia telah melakukan survei kecil-kecilan di Belanda dan juga mencoba melakukannya di Maluku saat mengunjungi keluarganya. Dengan bantuan ibunya, ia menerjemahkan pertanyaan-pertanyaan ke dalam bahasa Indonesia dan meminta kerabatnya di Maluku berpartisipasi dalam penelitiannya. Ia bercerita bahwa para kerabatnya tersebut sempat enggan melakukannya. Namun pada akhirnya, seorang paman dan keponakannya memutuskan mengisi lembar survei yang ia buat. Sekembalinya ke rumah, ia menerjemahkan jawabannya dan merasa sedikit kecewa. Sang paman dan keponakannya

tidak benar-benar menjawab pertanyaan, hanya memberikan jawaban berputar-putar dan tidak menjawab intinya secara langsung. Namun, ia berkata bahwa dirinya maklum. Tentu saja mereka setidaknya punya sedikit rasa bangga atas kontribusi pamannya dalam perjuangan RMS, namun mereka tidak bisa menuliskan atau membicarakannya karena adanya larangan untuk membicarakan RMS di Indonesia. Lalu, saya katakan kepadanya bahwa yang ia jelaskan itu bisa saja menjadi alasannya. Tapi mungkin juga ada penjelasan lain. Menurut saya, mungkin saja sang paman dan keponakannya tidak ingin memermalukannya dengan secara eksplisit menolak atau menepis ide RMS karena mereka tahu ia akan melihatnya dari segi yang positif. Kemudian, ia mengangguk dan dengan wajah berpikir berkata, “Ya, mungkin saja begitu.”

Apa pun masalahnya—entah sang paman dan keponakannya takut untuk mengatakan sesuatu tentang RMS, entah mereka tidak ingin memermalukannya, atau apakah ada alasan lain mengapa mereka memutuskan untuk menjawab pertanyaan sedemikian rupa—kita tidak akan tahu. Bukan hanya karena kita tidak bisa bertanya kepada sang paman dan keponakannya, tapi karena kenyataan bahwa RMS tidak dibahas di Indonesia, atau lebih tepatnya, dilarang. Karena itu, kita tidak akan pernah tahu apakah sang paman dan keponakannya mendukung, menolak, atau hanya tidak peduli pada RMS. Pada saat yang sama mereka mungkin juga tidak akan tahu persis bagaimana pendapat siswa tersebut tentang RMS karena mereka semua tidak membahasnya. Yang ada adalah asumsi dari kedua sisi tentang bagaimana mereka berpendapat mengenai RMS. Dengan kata lain, ada keheningan besar. Ada kebungkaman tentang kekerasan di masa lalu yang melibatkan gerakan RMS di Maluku, pemerintah Indonesia, serta tentara Indonesia, yang mengakibatkan tercerai-berainya keluarga Maluku secara fisik, di mana sejumlah orang Maluku mengasingkan diri ke Belan-

da. Seperti yang akan saya kemukakan di sini, kebungkaman tentang masa lalu ini sampai taraf tertentu dan dalam konteks tertentu merumitkan menjembatani hubungan antara orang Maluku di Belanda dan di Indonesia.

Untuk memahami kebungkaman soal RMS dan implikasinya, saya akan mengawali pembahasan dengan memaparkan kronik pemicu proklamasi RMS pada 1950. Kemudian, saya akan berfokus pada latar belakang mengapa RMS membawa 3.500 tentara kolonial Maluku ke Belanda. Bagian berikutnya membahas tentang jalan berbeda yang ditempuh orang Maluku di Belanda dan di Maluku—di sini akan dibahas pembubaran RMS pada 1963 di Maluku, radikalisme di kalangan orang Maluku di Belanda, dan kebangkitan RMS baru di Maluku pada awal abad ini. Kemudian, saya akan mendalami beberapa momen—yang tidak hanya berkaitan dengan stigma dan tabu tetapi terkait juga dengan identitas dan beban—yang memperlihatkan perbedaan pengalaman atau perspektif antara orang Maluku di Belanda dan di Maluku. Saya akan mengakhirinya dengan pendapat tentang apa yang bisa dicapai bila dialog tentang RMS dapat dilakukan dengan terbuka.

Lintasan Sejarah Proklamasi RMS

Untuk memahami proklamasi RMS pada 25 April 1950 di Ambon, pertama-tama kita harus menilik kembali sejarah tentang zaman penjajahan dan membahas kemunculan orang Maluku sebagai tentara etnis, yang pada masa itu disebut sebagai orang Ambon. “Proyek kolonial” Belanda di Maluku dimulai pada awal abad ke-17 ketika VOC dengan kejam memonopoli perdagangan pala, cengkeh, dan rempah-rempah yang hanya dapat ditemukan di Kepulauan Maluku. Selain itu, Belanda juga mengikuti jejak pendahulu mereka di Eropa, yaitu Portugis, dalam mengkristenkan sebagian penduduk di Maluku,

tujuannya agar tercipta keseimbangan 50-50 antara populasi Muslim dan Kristen. Setelah pasar rempah-rempah dunia turun, Maluku agaknya terlupakan. Sampai pada abad ke-19, pascakebangkrutan VOC, negara Belanda mengambil alih VOC dengan menciptakan koloni di bawah naungan bangsawan Belanda dengan pemerintah Hindia-Belanda setempat.

Kerajaan Belanda baru terbentuk sekitar tahun 1813. Pada saat itulah tentara kolonial, KNIL, dibentuk dan Maluku seperti ditemukan kembali. Kali ini, mereka dijadikan sebagai pendukung pemerintahan kolonial Belanda, yaitu: sebagai guru, PNS, dan serdadu. Di kalangan penguasa tentara kolonial, orang Maluku khususnya yang beragama Kristen dianggap sebagai serdadu yang setia dan unggul (Steijlen 2015: 229-248). Pada awalnya, karena rendahnya minat orang Maluku untuk mengabdikan, Belanda menawarkan hak istimewa (bayaran yang lebih baik, memberikan sepatu, serta menawarkan pendidikan yang lebih layak bagi anak-anak mereka) serta bonus tinggi untuk kepala desa jika pemuda dari desanya bersedia masuk KNIL. Orang Maluku direkrut dan mereka memainkan peran penting dalam perang kolonial menaklukkan wilayah-wilayah Nusantara yang berjuang keras melawan kekuatan kolonial Belanda seperti Aceh. Citra Maluku sebagai tentara etnis yang setia mulai muncul, semua pihak memercayai itu dan orang Maluku pun berperilaku sesuai dengan citra tersebut. Di mata orang luar, KNIL didominasi oleh orang Maluku, padahal mereka hanya 15% dari tentara KNIL pribumi (van Kaam 1977).

Ketika Jepang menginvasi Hindia-Belanda dan mengalahkan KNIL hanya dalam beberapa hari, penjajah Jepang menganggap Maluku sebagai sekutu Belanda yang terlalu berbahaya. Sebagai contoh, tentara Maluku dibawa sebagai tawanan perang, sedangkan tentara pribumi lainnya dipulangkan. Setelah Jepang menyerah dalam Perang Dunia II pada 15 Agustus 1945 dan Republik Indonesia diproklamasikan dua hari kemudian,

kekuasaan Jepang di Maluku diambil alih oleh Australia. Berbeda dengan Jawa dan Sumatra yang dipimpin oleh Inggris, pihak Australia memberi ruang bagi Belanda untuk membangun kembali kekuasaan kolonial di Maluku. Hal ini menyebabkan, di satu sisi, redamnya gerakan-gerakan di Maluku yang mendukung proklamasi Republik Indonesia, dan di sisi lain, perekrutan baru untuk pembentukan kembali KNIL (Chauvel 1990). Karena perkembangan ini dan karena mantan tentara KNIL Maluku yang tersebar di Nusantara telah kembali dari kamp-kamp tawanan perang, KNIL Maluku sekali lagi mendukung kepentingan Belanda di Nusantara: melawan Republik Indonesia (Oostindie dan Steijlen 2021; Steijlen 2022). Mereka yang berperang di pihak Belanda lebih terlihat daripada yang bertempur di pihak Republik Indonesia. Pada Desember 1949, perang ini berakhir dengan penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) di mana Republik Indonesia saat itu merupakan bagian dari negara federal tersebut. Federasi ini merupakan gagasan Belanda, yang didukung oleh beberapa kekuatan yang ada di Indonesia. Struktur federal sudah dibahas dalam konferensi Linggarjati pada 1946 dan Belanda mulai mendirikan negara federal Indonesia Timur segera setelahnya, yaitu Negara Indonesia Timur (NIT). Maluku Selatan merupakan suatu daerah dalam negara federal ini, dan dewan daerah Maluku yaitu Dewan Maluku Selatan (DMS) memutuskan bergabung dengan NIT untuk sementara (Chauvel 1990: 246).

Setelah penyerahan kedaulatan kepada RIS, struktur federal mulai runtuh dan beberapa gerakan muncul sebagai reaksi. Pada Maret-April 1950, ketika NIT diharapkan akan membubarkan diri dan bergabung dengan Republik Indonesia yang sedang berkembang, kaum intelektual di Ambon yang didukung oleh tentara KNIL yang berbasis di Ambon memproklamkan sebuah republik merdeka: RMS. Salah satu faktor pendorongnya adalah anggapan bahwa dominasi RI akan berdam-

pak negatif bagi orang Maluku yang memiliki posisi istimewa di masa kolonial. Proklamasi dilakukan atas dasar kesepakatan-kesepakatan yang ditetapkan pada saat Maluku Selatan bergabung dengan NIT pada 1946 (Chauvel 1990). Tokoh utama di balik proklamasi adalah Mr. Dr. Chris Soumokil dan Ir. Johannes Manusama, didukung oleh tentara KNIL Maluku yang berada di Ambon. Soumokil dan Manusama lahir di luar Maluku. Manusama tiba di Ambon pada 1947 di mana dia menjadi kepala sekolah menengah dan aktif dalam politik. Soumokil saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman NIT (Steijlen 1996b: 40).

Penguasa militer Belanda berusaha memasung RMS dengan memerintahkan tentara KNIL untuk kembali ke barak. Perintah tersebut ditanggapi dengan penarikan diri secara simbolis dari KNIL dan pembentukan tentara RMS.

Pemerintah Indonesia, yang sejak 15 Agustus 1950 telah kembali ke UUD 1945 dan bertransformasi dari negara federal Indonesia menjadi negara kesatuan sebagaimana diproklamirkan lima tahun sebelumnya, menganggap RMS sebagai pemberontakan separatis, dan mereka pun mencoba bernegosiasi (Steijlen 2015). Setelah negosiasi gagal, tentara Indonesia menyerbu Kepulauan Maluku untuk mengambil alih. Akibatnya, pecah pertempuran sengit, hingga mundurnya pemerintahan dan tentara RMS ke pedalaman Pulau Seram. Sejak November 1950, Indonesia menguasai Maluku, menyisakan jalan dan desa-desa yang rusak berat akibat perang melawan RMS, dan memojokkan gerilyawan RMS di pedalaman Seram.

Tiga peristiwa yang menentang proses transformasi struktur federal menjadi negara kesatuan sejak penyerahan kedaulatan yang melibatkan tentara KNIL Maluku membuat pemerintah Indonesia mencurigai serdadu KNIL Maluku. Peristiwa pertama adalah kudeta Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang dipimpin oleh mantan komandan Korps Speciale Troepen (KST)

Belanda, Westerling, di Pasundan pada Januari 1950. Yang kedua adalah peristiwa Andi Azis pada Maret 1950 di Makassar. Yang ketiga adalah proklamasi RMS. Pihak berwenang Belanda diduga terlibat dalam ketiga peristiwa tersebut sebagai upaya untuk mempertahankan pengaruhnya di republik yang baru terbentuk.

Serdadu Maluku Beranjak ke Belanda

Setelah penyerahan kedaulatan ke Indonesia, tentara kolonial tidak lagi diperlukan dan harus dibubarkan. Prajurit serta perwira Eropa dan Indo-Eropa dapat memilih untuk pulang ke Belanda dan bergabung dengan angkatan bersenjata Belanda. Sedangkan personil militer pribumi dapat memilih untuk bergabung dengan tentara Indonesia, atau—merujuk pada kesepakatan pada saat penandatanganan dinas—prajurit pribumi berhak mengundurkan diri dari dinas ketentaraan dan dipulangkan ke tempat asalnya.

Selama bulan-bulan pertama tahun 1950, sekitar 1.000 tentara Maluku bergabung ke tentara Indonesia yang pada saat itu masih bernama Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS). Sejumlah 1.600 tentara diberangkatkan ke Ambon, di mana mereka menunggu untuk dipindahkan ke APRIS atau dipensiunkan, dan sekitar 3.000–4.000 lainnya yang ada di penjurut Nusantara menunggu untuk dibawa kembali ke Maluku atau dipindahkan ke APRIS (van Kaam 1977; Oostindie dan Steijlen 2021). Namun, proklamasi RMS—yang terjadi sesudah peristiwa APRA dan peristiwa Andi Azis—merumitkan demobilisasi prajurit Maluku.

Para komandan tentara Belanda di Indonesia mencoba ikut campur di Ambon dengan memanggil tentara KNIL Maluku yang ada di Ambon untuk kembali ke barak mereka. Akan tetapi, 1.600 prajurit KNIL di Ambon menolak menerima perin-

tah dari perwira Belanda dan mengundurkan diri secara massal dari KNIL dengan menyerahkan epolet dan senjata mereka secara simbolis.

Saat itu, sebagian besar prajurit KNIL Maluku yang berada di luar Maluku mendukung proklamasi RMS dan ingin kembali ke Maluku. Namun, pemerintah Indonesia maupun Belanda enggan memulangkan mereka ke Maluku. Bahkan penguasa militer Belanda memusatkan tentara Maluku di Jawa. Tentara Maluku khawatir bahwa pemerintah Belanda akan memaksa mereka didemobilisasi di Jawa dan tidak akan membawa mereka ke Maluku. Karena itu mereka pun mengirim delegasi ke Belanda yang dipimpin oleh Sersan Mayor Aponno (Manuhutu dan Smeets 1991). Delegasi ini berhasil mengajukan gugatan terhadap pemerintah Belanda yang melarang demobilisasi tentara Maluku di luar kehendak mereka di wilayah yang dikuasai oleh Indonesia. Artinya, pemerintah Belanda tidak dapat memaksa tentara Maluku keluar dari angkatan bersenjata; apalagi hampir tidak ada tempat bagi mereka setelah pasukan Indonesia mengambil alih Maluku pada November 1950. Untuk menjaga hubungan saat KNIL sudah resmi dibubarkan pada 26 Juli, pemerintah Belanda memberikan status sementara sebagai Tentara Kerajaan Belanda kepada para prajurit Maluku, sampai dinyatakan bebas tugas.

Upaya mencari lokasi lain untuk demobilisasi tentara Maluku tidak membuahkan hasil. Selama tentara Maluku tidak setuju didemobilisasi di Indonesia, hasilnya hanya akan berujung buntu. Untuk menghindari kebuntuan ini, pemerintah Belanda memberikan tiga pilihan kepada tentara Maluku: pindah ke tentara Indonesia, demobilisasi pada waktu itu juga, atau dipindah ke Belanda untuk tinggal sementara. Jika mereka tidak memilih, tentara Maluku akan diberikan perintah paksa dibawa ke Belanda, yang berarti mereka bisa dipecat jika tidak patuh.

Pemerintah Belanda pun mulai mempersiapkan pemindah-

an tentara Maluku ke Belanda. Pada Februari, kelompok pertama diperintahkan berangkat bersama keluarga mereka ke Belanda. Pada 21 Maret 1951, SS Kota Inten, angkutan pertama dari 12 wahana pengangkutan, yang membawa 3.500 mantan prajurit KNIL Maluku beserta keluarganya, tiba di pelabuhan Rotterdam. Totalnya, sebanyak 12.800 orang dibawa ke Belanda. Beserta prajurit KNIL dan keluarga mereka ini, ada pula kedatangan 70 orang Maluku yang bertugas di Angkatan Laut Kerajaan Belanda, hampir 200 warga sipil, 80 penumpang gelap (di antaranya 67 rekrutan polisi negara dari Makassar), dan 57 orang yang harus diamankan karena pekerjaan intelijen mereka untuk Belanda.

Rencana awalnya, mereka akan tinggal di Belanda hanya selama 6 bulan. Namun kemudian para mantan tentara KNIL itu merasa kecewa dan marah karena beberapa sebab, yaitu: mereka dipecat begitu tiba di Belanda, diperlakukan secara paternalistik dan mereka beserta keluarganya ditempatkan di barak terpencil sambil menunggu kepulangan. Dan puncaknya, dengan merujuk perjanjian yang dibuat sewaktu pemindahan kedaulatan, mereka menganggap diri sebagai warga negara RMS meskipun mereka adalah warga negara Indonesia.

Bersimpang Jalan

Selama menempati barak-barak di Belanda, para mantan tentara KNIL dan keluarganya mendirikan lembaga-lembaga, seperti gereja, badan perwakilan, kumpulan dan lainnya, yang kemudian menjadi fondasi terbentuknya masyarakat Maluku di Belanda (Steijlen 2016). Mereka juga mengorganisir diri secara politis dan terhubung dengan perwakilan RMS di Belanda, dan lebih lanjut menjadi organisasi-organisasi pendukung perjuangan RMS.

Pada Agustus 1951 terjadi konflik antara kubu asal Maluku

Tenggara dan kubu asal Maluku Tengah sehingga memicu berdirinya organisasi khusus Maluku Tenggara yang menolak cita-cita RMS. Meskipun demikian, mayoritas dari mereka tetap setia kepada RMS, dan mendukung gerilya RMS yang dipimpin oleh Soumokil di pedalaman Seram (Steijlen 1996b: 104-108). Pada 1953, Manusama, salah satu intelektual di balik proklamasi RMS, datang ke Belanda untuk memperkuat dukungan bagi RMS.

Gerilya RMS di Seram berakhir pada 1963 ketika Soumokil dan para gerilyawan RMS yang tersisa ditangkap oleh tentara Indonesia. Soumokil divonis mati pada 1964 dan dieksekusi pada 12 April 1966. Hal ini mendorong janda dan anak Soumokil meninggalkan Indonesia dan menetap di Belanda. Sebagai reaksi atas eksekusi Soumokil, dibentuk sebuah pemerintahan pengasingan RMS di Belanda yang dipimpin oleh Manusama sebagai presiden. Sejak terbentuknya pemerintahan pengasingan tersebut, keseluruhan aktivitas politik RMS dikendalikan di pengasingan karena tidak ada lagi gerakan RMS di Maluku.

Pada periode yang sama, pemuda Maluku di Belanda tampil di arena politik. Orientasi politik mereka bahkan lebih radikal daripada orang tua mereka. Mereka terinspirasi oleh gerakan Black Panther di Amerika Serikat dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Proses radikalisasi para pemuda Maluku ini berujung pada enam aksi penyanderaan yang dilakukan antara 1970 hingga 1978, sebagai berikut: kediaman duta besar Indonesia, dua pembajakan kereta api, konsulat Indonesia di Amsterdam, sebuah sekolah dasar, dan kantor pemerintah provinsi.

Di bawah gelombang aksi-aksi radikal tersebut, diskusi-diskusi di kalangan pemuda Maluku memunculkan pandangan bahwa daripada berjuang membawa RMS ke Maluku lebih baik memperjuangkan kebebasan berpendapat di Indonesia agar masyarakat Maluku bisa menentukan sendiri masa depan mereka. Beberapa pemuda Maluku sayap kiri lainnya mencari

kerja sama dengan eksil politik Indonesia di Belanda yang aktif mengkritik rezim Soeharto atas pelanggaran hak asasi manusia.

Perlahan, politik RMS kurang mendapat prioritas bagi orang Maluku di Belanda. Mereka mulai mendefinisikan kembali hubungan mereka dengan Maluku dan posisi mereka di Belanda, dengan cara mengubah status dari eksil menjadi pendatang. Lambang-lambang yang terkait dengan RMS, seperti bendera dan singkatan RMS menjadi penanda identitas karena secara khusus merujuk pada alasan mereka datang ke Belanda, dan sepanjang tinggal di Belanda, lambang tersebut mendominasi keberadaan mereka (Steijlen 2010). Pada saat yang sama, pertemuan RMS terus diselenggarakan oleh orang-orang Maluku yang masih mendukung RMS, seperti pemerintah pengasingan. Tidak semua yang hadir dalam pertemuan-pertemuan tersebut datang dengan ide-ide separatisme, ada juga yang datang untuk bertemu dengan sesama orang Maluku lainnya.

Di Maluku, hanya sesekali ada acara pertemuan RMS, misalnya, saat insiden pengibaran bendera RMS pada 1984. Dalam pengamatan saya selama mengunjungi Maluku pada pertengahan 1980-an dan awal 1990-an, RMS masihlah ambigu. Di satu sisi, ada anggapan bahwa RMS sangat terkait dengan peristiwa separatis tahun 1950 dan oleh karena itu menjadi topik yang sangat sensitif secara politik. Di sisi lain, singkatan RMS dipakai sebagai cara untuk mengungkapkan aspirasi tentang otonomi atau pelibatan orang Maluku yang lebih besar dalam masa depan Maluku. Menurut pendamping saya yang orang Maluku, hanya sedikit orang Maluku asli yang mendukung posisi kunci di Maluku, dan pemerintah pusat (semasa Orde Baru) menarik keuntungan ekonomi yang begitu besar dari Maluku sehingga secara ekonomi Maluku dirugikan. Ekspresi ketidakpuasan ini diberi label RMS oleh mereka sendiri. Ketika saya tanyakan ke rekan bicara saya itu apakah membicarakan RMS juga berarti ingin agar pemerintah pengasingan

RMS di Belanda datang ke Maluku dan mengambil alih? Mereka menjawab tidak. Mereka ingin memiliki kontrol akan diri sendiri dan tidak kembali ke tahun 1950. RMS pada pertengahan 1980-an dan awal 1990-an lebih banyak digunakan secara simbolis untuk menyatakan kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap situasi yang ada dengan mengacu pada sikap orang Maluku sebelumnya untuk mengambil alih kendali atas masa depan mereka.

Keadaan berubah secara dramatis setelah rezim militer Soeharto lengser pada 1998 oleh gerakan reformasi. Jatuhnya Soeharto mengakibatkan berakhirnya rezim otoriter dan memunculkan ruang bagi inspirasi lokal. Hal ini di satu sisi didorong oleh kebijakan desentralisasi yang disertai oleh melemahnya otoritas, dan terjadinya rivalitas antar jaringan elite. Di Maluku, hal ini antara lain menyebabkan konflik horizontal pada Desember 1999 yang disulut oleh perselisihan antara sopir bus dan penumpang hingga memuncak menjadi konflik kekerasan selama 3-4 tahun antara komunitas Kristen dan Muslim. Selama kerusuhan ini, pada sekitar Desember 2000, proklamasi RMS diperbarui oleh Front Kedaulatan Maluku (FKM-RMS). FKM didukung oleh sebagian orang Maluku di Belanda (Steijlen 2005). Bahkan sesudah kerusuhan di Maluku berakhir, pengibaran bendera RMS di Maluku berlanjut setiap tahun. Para pengibar bendera yang ditangkap dan kemudian diperlakukan dengan buruk karena larangan mengibarkan bendera RMS di Indonesia, akhirnya bisa mengandalkan dukungan dari orang Maluku di Belanda, antara lain berupa sumbangan untuk membayar biaya bantuan hukum. Di Belanda, penggalangan dana untuk sumbangan semacam itu dilakukan selama aksi demonstrasi, di mana bendera RMS dikibarkan secara besar-besaran. Apakah ini menjadi pertanda pro-separatisme atau bukan, masih harus dipertanyakan. Yang pasti, bendera RMS juga melambangkan identitas dan sejarah orang Maluku-Belanda,

dan pemberian sumbangan uang untuk membiayai bantuan hukum merupakan dukungan bagi kebebasan berbicara.

Di Maluku, pembaharuan proklamasi RMS juga menandakan regenerasi ide dan cita-cita RMS di Maluku. Gagasan tentang RMS, baik sebagai ide separatisme atau sebagai ekspresi akan otonomi yang lebih besar, dibahas kembali dan menghasilkan sebuah tesis tentang dasar hukum proklamasi RMS 1950 yang ditulis di sebuah universitas di Maluku. Selain diskusi, ada juga ekspos atas atribut RMS, terutama bendera, dalam pertunjukan atau ekspresi sehari-hari. Peristiwa-peristiwa ini, yang disusul dengan tanggapan represif dari pemerintah Indonesia, menunjukkan adanya struktur organisasi di balik peristiwa-peristiwa tersebut. Orang-orang tersebut dianggap sebagai bagian dari suatu gerakan. Sehingga setiap tahun pada tanggal 25 April, yakni hari proklamasi RMS pada 1950, militer Indonesia dikirim ke tempat-tempat rawan RMS, seperti desa Aboru di Pulau Haruku.

Stigma dan Tabu

Makna RMS dan simbol-simbolnya di Belanda sebagaimana dikemukakan di atas jauh lebih kompleks dan berlapis daripada sekadar ekspresi atau cita-cita separatisme. Penting untuk diperhatikan, bagi orang Maluku di Belanda, RMS tidak dapat dipisahkan dari keberangkatan mereka ke Belanda, dan RMS merupakan peristiwa penting dalam migrasi mereka. Artinya, RMS adalah bagian dari identitas mereka, bahkan dalam kasus-kasus di mana orang Maluku tidak mendukung gerakan awal dari separatis tersebut. Selama penelitian Ph.D saya tentang nasionalisme Maluku di Belanda (Steijlen 1996b), teman saya, seorang keturunan Maluku yang tidak mendukung RMS sama sekali, mengatakan bahwa jauh di lubuk hatinya, ia pastilah seorang RMS juga. Ia menjelaskan bahwa ayahnya datang ke

Belanda karena tidak bisa kembali ke Maluku sebagai akibat dari gerakan RMS. Dan seperti orang Maluku lainnya, ayahnya dipecat, mereka tinggal di barak dan lingkungan khusus bagi orang Maluku (Steijlen 1996b: 214). Baginya, RMS adalah sebuah konsep yang memuat sejarah khas Maluku di Belanda dengan proklamasi RMS sebagai titik tolaknya.

Kita mungkin mengira bahwa makna RMS di Maluku juga berubah dan berbeda dengan saat proklamasi RMS pertama pada 1950. Ada orang Maluku yang berbicara terbuka tentang RMS atau sebaliknya yang secara simbolis menyebutnya. Ada beberapa tesis ditulis tentang dasar hukum proklamasi RMS. Ada beberapa dosen perguruan tinggi yang memulai pengajarannya dengan “Mena” dan diakhiri dengan “Muria”, mengacu pada slogan “Mena Muria” dari RMS—yang bisa dianggap provokatif dalam konteks Indonesia. Namun, kita tidak tahu apakah orang tersebut memang ingin memprovokasi diskusi tentang separatisme atau hanya melakukan kebebasan berbicara. Sampai batas tertentu, hal tersebut juga berlaku untuk orang-orang yang mengibarkan bendera RMS. Terkadang, RMS juga disebutkan dalam debat publik. Pada 2018, saya menghadiri pertemuan tentang hak asasi manusia. Beberapa peserta menyebut RMS sebagai hal yang tabu di Indonesia, ada juga yang menyebutkan nasib pria yang ditangkap karena mengibarkan bendera RMS. Namun, diskusi lebih lanjut tentang mengapa dan apa maksud pernyataan mereka ini sulit dilakukan karena bagi sebagian besar peserta hal itu adalah area terlarang.

Pada era 1980-an dan 1990-an, RMS adalah area yang benar-benar dilarang untuk dibicarakan, bahkan hingga 2018 pembahasan mengenai RMS masih sulit dilakukan. Ketika saya mengunjungi Maluku untuk pertama kalinya pada pertengahan 1980-an, saya bertemu dengan seorang lelaki tua yang bergabung dengan gerilya RMS di Seram pada 1950. Namun, ia meninggalkan Seram dan memilih kembali pulang ketika meng-

amati bahwa penduduk lokal Seram tidak bergabung dengan RMS dan bahkan mulai melawannya. Setiap kali ia memberi tahu saya tentang keterlibatannya dalam RMS, ia merendahkan suaranya agar orang lain tidak menguping dan mendengar apa yang kami bicarakan. Kemudian, pengalaman yang sama saya alami ketika memasuki beberapa rumah di kota Ambon: orang ingin memberi tahu saya tentang RMS, namun tidak ingin tetangga mereka tahu apa yang kami diskusikan.

Dalam kunjungan saya ke Maluku pada sekitar 2010-an, orang-orang mulai berani berbicara tentang RMS dan mengkritik pemerintah pusat. Suatu ketika, tiga orang datang ke hotel saya untuk menyerahkan tesis tentang dasar hukum proklamasi RMS yang dituliskan seorang sarjana Maluku. Ini tentunya hasil dari lebih seringnya ekspresi RMS melalui pengibaran bendera sejak awal abad ke-21. Sejalan dengan keterbukaan terbatas dalam membincang RMS secara positif, banyak orang di Maluku menyebut RMS sebagai stigma. Mereka merasakan RMS sebagai beban. Pada 1990-an, orang Maluku di Maluku membicarakan RMS sebagai alasan yang dipakai pemerintah pusat untuk tidak memberikan dukungan bagi pembangunan daerah tersebut. Mereka menyalahkan gerilyawan RMS sebagai penyebabnya. Dan akibatnya, butuh waktu lama sebelum orang Maluku akhirnya diangkat untuk menduduki posisi penting di daerahnya.

Baru-baru ini, orang Maluku di Maluku menuturkan bahwa mereka merasakan RMS sebagai sebuah stigma. Begitu orang Maluku bersikap kritis terhadap pihak berwenang, mereka mungkin akan dituduh pro-RMS. Hal ini memunculkan bentuk *swasensor* (*self-censorship*) di mana intelektual Maluku menghindari topik sensitif atau menghindari sikap yang terlalu kritis terhadap pemerintah. Perasaan adanya stigma atas RMS ini mewarnai hubungan antara daerah dan pemerintah pusat. Orang-orang takut pemerintah pusat akan selalu memperlakukan

Maluku dengan ketidakpercayaan karena RMS.

Orang Maluku-Belanda tahu tentang tabu RMS di Indonesia. Oleh karena itu, mereka hampir tidak akan membicarakan RMS dengan kerabat atau teman mereka di Maluku. Mereka juga akan mencoba mencegah penggunaan simbol terkait RMS ketika mengunjungi Maluku. Sebagai contoh, ketika anggota geng motor SatuDarah, yang sekarang dilarang, mengunjungi Maluku, mereka tidak memakai lencana RMS sebagai bagian dari warna geng mereka yang merupakan standar di Belanda.

Membuang RMS vs. Identitas

Yang tersisa hanyalah kebisuan. Menurut beberapa orang Maluku-Belanda, hal ini adalah tanda bahwa semua orang Maluku di Maluku mendukung RMS tetapi tidak berani membicarakannya. Begitulah cara mereka memaknai kebisuan. Juga bagi para pemimpin politik RMS di Belanda, kebisuan “membuktikan” bahwa dukungan terhadap RMS di Maluku masih sangat hidup. Kebisuan seputar RMS menghalangi kerabat di Maluku mempertanyakan sejarah Maluku di Belanda. Saya mendiskusikan hasil pengamatan saya dengan seorang teman berdarah Maluku di Belanda, yang secara teratur mengunjungi Maluku, dan ia menegaskan bahwa ada “kebisuan” tentang sejarah Maluku di Belanda. Tidak ada kerabatnya di Maluku yang pernah bertanya mengapa mereka tidak “pulang”. Menurutny, bukan hanya disebabkan oleh kurangnya minat bertanya, tetapi juga untuk mencegah mereka membicarakan RMS. Hal itu menciptakan jarak dalam hubungan dengan para kerabat, meskipun ia sangat dekat dan akrab dengan mereka.

Patut disayangkan bahwa hal ini tidak hanya terjadi di banyak keluarga, dari masyarakat Maluku sendiri hampir tidak ada pertanyaan-pertanyaan tentang sejarah dan RMS di Belanda. Oleh karena itu, tidak ada pemahaman tentang kompleks-

tas makna RMS bagi orang Maluku-Belanda. Di suatu kesempatan yang saya hadiri, hal ini menjadi sangat jelas. Dalam sebuah panel tentang diaspora Maluku yang berlangsung dalam suatu konferensi di Maluku, saya mempresentasikan makalah berjudul "Contesting Identities: Moluccans in Dutch Diaspora". Tentu saja, saya harus berbicara tentang RMS sebagai salah satu alasan mengapa orang Maluku datang ke Belanda dan sebagai penanda identitas. Salah satu peserta bertanya tentang RMS di Belanda. Namun, ia tidak berbicara kepada saya, melainkan kepada dua rekan panelis saya yang berdarah Maluku di Belanda. Tidak ada satu pun dari mereka yang menyebutkan RMS dalam makalah mereka. Pertanyaan yang ia ajukan kepada mereka adalah: mengapa mereka masih berpegang pada RMS? Mengapa mereka tidak "membuang RMS" yang hanya menimbulkan masalah? Kedua rekan panelis saya menanggapi dengan mengatakan bahwa mereka tidak bisa "membuang RMS". Bagaimana bisa? Alasannya, RMS tidak bisa dipisahkan dari sejarah mereka. RMS jugalah yang sangat menentukan nasib keluarga mereka, yang membawa mereka ke Belanda. Hal tersebut tidak ada hubungannya dengan ide-ide politik tentang separatisme, yang harusnya dipahami secara terpisah.

Kekerasan Keheningan

Seiring waktu, rencana semula untuk tinggal sementara di Belanda berubah menjadi tinggal secara permanen. Penting untuk dicermati bahwa kepergian mereka ke Belanda tidak berarti hilangnya hubungan dengan keluarga, desa, dan pulau asal di Maluku. Pada awalnya mereka mengorganisir diri dalam kumpulan dan tetap terhubung dengan Maluku melalui ide-ide politik mereka. Dan ketika domisili mereka jadi lebih permanen, mereka tetap terhubung dengan keluarga, desa, dan pulau meski dengan cara yang berbeda, sehingga menciptakan konek-

si global sebagai bagian dari warisan pascakolonial.

Kebisuan dalam dialog tentang RMS antara orang Maluku di Belanda dan di Indonesia menimbulkan jarak. Bahkan, keheningan menciptakan jarak yang lebih luas dengan masyarakat Indonesia—sebut saja jarak yang tersembunyi. Orang Maluku-Belanda berhubungan dengan keluarga mereka di Maluku dan kerabat di tempat-tempat lain di Indonesia baik yang Maluku maupun non-Maluku, karena 27% pasangan militer yang dikirim ke Belanda bukan orang Maluku asli. Hubungan ini intim, tulus, dan saling peduli satu sama lain. Tetapi kebisuan seputar RMS mencegah pencarian yang lebih dalam tentang sejarah dan identitas yang terhubung. Sejarah orang Maluku datang ke Belanda, seperti kita lihat di atas, mengambil jalan yang berbeda.

Kebisuan itu menyakitkan karena ini tentang suatu peristiwa atau perkembangan bersejarah yang memainkan peran penting dalam pemisahan Maluku di Belanda dan di Indonesia. Pemaknaan atas RMS terus memecah belah orang Maluku di Belanda dan di Indonesia, meskipun hubungan di antara mereka sempat "diperbarui" setelah 1970-an. Kebisuan juga menghalangi mereka untuk saling mengerti tentang lintasan sejarah yang berbeda yang dilalui orang Maluku di Belanda dan di Indonesia. Bagi kebanyakan orang Maluku di Maluku, RMS mungkin merupakan peristiwa politik dari masa lalu. Untuk sebagian lainnya, RMS menjadi bagian dari kenyataan masa kini. Dapat disimpulkan bahwa bagi mayoritas di Maluku, RMS bergema sebagai stigma yang menghalangi posisi kritis terhadap politik nasional Indonesia.

Bagi orang Maluku di Belanda, RMS tidak bisa dianggap "hanya peristiwa masa lalu", melainkan peristiwa kunci yang membawa mereka ke Belanda. RMS adalah penentu utama yang mendorong mereka menjauh dari rumah, dari Maluku, dan sangat memengaruhi identitas mereka di diaspora.

Saat ini, situasi menjadi semakin rumit mengingat hampir

tidak adanya kebebasan berbicara mengenai sejarah dan makna RMS. Keheningan yang terjadi merupakan kelanjutan dari kekerasan atas pemisahan paksa orang Maluku pada 1951. Hal tersebut menghalangi pemahaman tentang RMS di Maluku sekarang ini. Pemahaman yang bukan melulu soal dukung-mendukung, tetapi juga atas maknanya: apakah tentang separatisme, atau soal otonomi, atau tentang sesuatu yang lain? Keheningan juga menghalangi Indonesia, khususnya Maluku, untuk memahami secara lebih baik mengenai kehidupan orang Maluku di Belanda, yang tidak bisa begitu saja “membuang RMS”.

Tidak ada ingatan bersama atau kolektif dari orang Maluku di Indonesia dan di Belanda mengenai alasan pemisahan tersebut. Masing-masing memori kolektif dianggap bersaing, atau bahkan berlawanan dan tidak saling melengkapi, dan juga dipahami sebagai memori yang baku dan tidak dinamis. Interaksi antara ingatan kolektif orang Maluku di Belanda dan Indonesia atas peristiwa pemisahan tersebut dapat menghasilkan ingatan kolektif bersama. Atau, dalam kata-kata Michael Rothberg (2009: 1-29), sebuah memori multiarah dapat membuka ruang di mana pengalaman dan pembacaan sejarah yang berbeda dapat saling memengaruhi tanpa mengesampingkan satu sama lain. Oleh karena itu, prasyarat untuk mewujudkan kondisi tersebut adalah dengan mencabut tabu politik dalam hal perbin-cangan mengenai RMS.

Daftar Rujukan

- Chauvel, Richard. *Nationalists, soldiers, and separatists: the Ambonese islands from colonialism to revolt, 1880-1950*. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 143. Leiden: KITLV Press, 1990.
- Kaam, Ben van. *Ambon door de eeuwen*. Baarn: Anthos, 1977.
- Manuhutu, W., dan Henk Smeets. *Tijdelijk verblijf: de opvang van Molukkers in Nederland, 1951*. [Moluks historische reeks, 1]. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1991.
- Oostindie, Gert, dan Fridus Steijlen. “Ethnic ‘Ferociousness’ in Colonial Wars: Moluccans in the Dutch Army in Indonesia, 1945–1949.” *Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 177, no. 4 (2021): 491–523.
- Rothberg, Michael. *Multidirectional memory: remembering the Holocaust in the age of decolonization. Cultural memory in the present*. Stanford, Calif: Stanford University Press, 2009.
- Steijlen, Fridus. “Hostage-taking actions by Moluccans in the Netherlands.” *Ethnos-nation* 4 (1996): 97–111.
- . *RMS: van ideaal tot symbool: Moluks nationalisme in Nederland 1951-1994*. Amsterdam: Spinhuis, 1996.
- . “Penanda Lama untuk Ideologi Baru: RMS dan Konflik Maluku.” Dalam *Desentralisasi, globalisasi, dan demokrasi lokal*, ed. Jamil Gunawan, Sutoro Eko Yunanto, Anton Birowo, dan Bambang Purwanto. Jakarta: LP3ES, 2004.
- . “Moluccans in the Netherlands: From exile to migrant.” *RIMA: Review of Indonesian and Malaysian Affairs* 44, no. 1 (2010): 143–162.
- . “Cohesie dankzij paternalisme?” Moluccan Historical Museum, Juni 2016.
- . “In and Out of Uniform: Moluccan Soldiers in the Dutch Colonial Army.” Dalam *Colonial Soldiers in Europe, 1914-1945: ‘Aliens in Uniform’ in Wartime Societies*, ed. Eric Storm dan Ali Al Tuma. New York: Routledge, 2016.
- . “Prolog.” Dalam *Sporen vol betekenis: In gesprek met ‘Getuigen & Tijdgenoten’ over de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog / Meniti Arti: Bertukar Makna bersama “Saksi & Rekan Sezaman” tentang Perang Kemerdekaan Indonesia*, disunting oleh Eveline Buchheim, Satrio Dwicahyo, Fridus Steijlen, dan Stephanie Welvaart. Amsterdam University Press, 2022.
- . “Mencari suara-suara dari Maluku.” Dalam *Sporen vol betekenis: In gesprek met ‘Getuigen & Tijdgenoten’ over de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog / Meniti Arti: Bertukar Makna bersama “Saksi & Rekan Sezaman” tentang Perang Kemerdekaan Indonesia*, disunting oleh Eveline Buchheim, Satrio Dwicahyo, Fridus Steijlen, dan Stephanie Welvaart. Amsterdam University Press, 2022.

an yang terbatas ini telah memperkaya perspektifnya dan memperkuat komitmennya sebagai seorang pendidik. Ia juga diangkat menjadi sekretaris Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sejarah Kabupaten Tasikmalaya untuk periode 2025-2028.

Fridus Steijlen adalah profesor emeritus “Migrasi dan Kebudayaan Maluku dalam perspektif komparatif” di Fakultas Ilmu Sosial Vrije Universiteit, Amsterdam, dan *fellow* kehormatan di KITLV, di mana dulu ia bekerja sebagai peneliti senior. Pada 2023 dan 2024 beliau menjabat sebagai dosen tamu di Universitas Pattimura, Ambon. Beliau adalah seorang antropolog yang menangani kehidupan sehari-hari di Indonesia, dekolonisasi dan migrasi pascakolonial dari Indonesia ke Belanda. Beliau adalah spesialis sejarah lisan dan memiliki pengalaman panjang dalam penelitian audiovisual. Beliau menulis beberapa buku dan artikel tentang sejarah orang Maluku di Belanda dan hubungan mereka dengan Maluku.

Grace Leksana adalah dosen Sejarah Indonesia di Departemen Sejarah & Sejarah Seni, Universitas Utrecht. Ia merupakan sejarawan sosial Indonesia dengan latar belakang interdisipliner. Karya-karyanya berfokus pada studi memori, kekerasan (epistemik) dan genosida, sejarah kelompok kiri, dekolonisasi, dan sejarah lisan. Dia menulis *Memory Culture of the Anti Leftist Violence in Indonesia: Embedded Remembering* (Amsterdam University Press, 2023). Saat ini ia sedang mengembangkan proyek baru tentang kekerasan, pangan, dan pengetahuan akar rumput.

Hariyono lahir di Malang, 27 Desember 1963. Ia adalah Guru Besar bidang Sejarah Politik di Universitas Negeri Malang. Beberapa penelitiannya adalah tentang *staat van oorlog en beleg* (keadaan darurat perang) di Indonesia, 1957-1963; sejarah intelektual dari para pendiri bangsa; kekerasan periode revolusi; serta praktik pembelajaran sejarah. Dapat dihubungi di surel: hariyono.fis@um.ac.id.

I Gusti Agung Ayu Ratih adalah pendiri dan direktur Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), lembaga arsip dan penelitian yang